

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. 2021.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Cet. I. EA Books. 2022.
- Amirrudin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi, Cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan*. Konstitusi Press. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Setjen DPR RI. 2022.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan 1. Mataram: Sanabil, 2022.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Negara hukum, demokrasi & judicial review*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 3. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Marzuki, P. D. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017.
- MD, Moh. Mahfud. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo. 1993.

- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Edisi 1. Yogyakarta: LP2M UPN “Veteran”. 2020.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Harakindo Publishing. Bandar Lampung: Harakindo Publishing. 2019.
- Permusyawaratan Rakyat, Majelis. t.t. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Saifudin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Edisi 1. Jakarta: FH UII Press. 2009.
- Saleh, Kurnia. *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Guepedia. 2020.
- Santosa, Achmad. *Good Governance dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL. 2001.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Triwahyuningsih. *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dan Implementasinya*. Cetakan 1. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Von Schmid, J. J, et al. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum: (Dari Plato sampai Kant) /J.J. von Schmid; terdj. [dari bahasa Belanda] oleh R. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi*. Pembangunan. 1980.
- Yayasan Obor Kepustakaan. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Zolo, Danilo, & Pietro Costa (eds). *The Rule of Law History, Theory and Criticism*. The Netherland: Springer. 2007.
- Sumber lainnya (Tesis, Skripsi, Jurnal, Situs Web):
- ADY. 2012. “Borosnya Biaya Pembuatan Undang-Undang.” *hukumonline*. Diambil 6 Oktober 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang-lt50e199f0bc17d/?page=all>).
- Annisa, Nurul. 2021. “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.”
- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation”. *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4. 1969. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

- Chandra SY, Helmi & Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, 19, no. 4, (2022): 779. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Dicey, Albert Venn, dan Michael L. Principe. *Essay Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain*. 2000.
- Dondokambey, Sarah Malena Andrea, *et al.* “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 9, no. 2, (2023): 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46626>.
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, no. 1, (2018): 52.
- Farisa, Fitria Chusna. “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 00.10 WIB.
- Febrian, Nadia Ayu, & Ryan Muthiara Wasti. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 7, no. 1. 2023.
- Ghenasyarif, Nur, *et al.* “Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, no. 1, (2022): 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.811>.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. “Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 4, 1, (2020): 43–62. doi: 10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62.
- Harijanti, Susi Dwi, *et al.* *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*. Bandung. 2020.
- Hassenforder, Emeline, *et al.* 2015. “Towards understanding participatory processes: Framework, application and results.” *Journal of Environmental Management*, 157: 84–95. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.04.012.

- Herawati, Putri, Belinda, & Yohanes Suwanto. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik bagi Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1, no. 2. 2022.
- ICLD. "Upaya Terburu-Buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang Yang Diperkenalkan Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan." *Indonesian Center For Legislative Drafting*, 2022.
- Irawan, Dika Gustiana, & Hario Danang Pambudhi.. *Menilik Kontroversi dibalik Revisi UU Minerba*. 2020.
- Irawan Febriansyah, Ferry. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Perspektif*, XXI, no. 3. 2016.
- Iswari, Fauzi.. "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*, 6, no. 1. 2020. doi: 10.3376/jch.v6i1.285.
- Ivanandin, Rizki Alvionito. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara: Studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022 perspektif siyasah qadha'iyah". 2023.
- Kusrini, Enick, *et al.* "Pengaruh Media Sosial terhadap Demokrasi Generasi Milenial." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, no. 2. 2023: 4.
- Laia, Sri Wahyuni, & Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, 10, no. 1, 2022: 548.
- Muhammad, Fadel. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang." Universitas Andalas. 2020
- Paulovics, Anita, & Z. Stipta. *Remarks on The Concept of The Rule of Law and Constitutionalism*. 2008.
- Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020." *Jurnal Crepido*, 04, no. 2, 2022.
- Prastyo, Angga. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11, no. 3, 2022: 405. doi: 10.25216/jhp.11.3.2022.405-436.
- Ramli, *et al.* "Studi Kritis terhadap Ragam Konsep Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*. 2019. doi: 10.31764/jmk.

- Saputra, Auditya, *et al.* “Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal e-participation untuk gandeng warga dalam kebijakan publik.” *The Conversation*. 2022. Diambil 13 Oktober 2023 (<https://theconversation.com/jangan-tunggu-viral-dulu-pentingnya-portal-e-participation-untuk-gandeng-warga-dalam-kebijakan-publik-191214>).
- Seta, Salahudin Tunjung. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17, no. 2, 2020. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.
- Setiawan, Agustina, *et al.* “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus Di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial Dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung.” *Jurnal Academia Praja*, 3, no. 2 (2020): 255–56.
- Sungkar, Lailani, *et al.* “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas.” *Jurnal Konstitusi*, 18, no. 4, (2022): 748. doi: 10.31078/jk1842.
- Tresna A., Nano, & Lulu A. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021. Diakses pada tanggal 6 Desember 2023. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>).
- Triyoga, Hardani, & Edwin Firdaus. “Pakar Dorong Uji Formil UU Ciptaker: Prosesnya Kacau, Bisa Dibatalkan.” *viva.co.id*. 2020. Diambil 3 November 2023. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan?page=2&utm_medium=page-2).
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, & *et al.* “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 3. Mei 2021: 251.
- Ummah, Vina Rohmatul. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2, no. 12 (2022): 167. DOI: <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2813>.
- Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Yurika. “DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU Minerba.” *duniaenergi*. 2020. Diambil 13 Oktober 2023. (<https://www.dunia-energi.com/dprdiminta-tunda-pengesahan-ruu-minerba/>).

Zakaria, Eka. "Demokrasi Dan Negara Hukum Muntoha." *Jurnal Hukum*, 16, no. 3 (2009): 387.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khabib Nurul Huda
NPM : 5120600159
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/24 Juli 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Kauman RT 2 RW 1 Desa Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SDN Karangtengah	2007	
2.	SDN Procot 02	2011	2013
3.	SMP N 3 Slawi	2013	2016
4.	SMK N 1 Adiwerna	2016	2019
5.	Universitas Pancasakti Tegal	2020	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2024

Hormat saya,

(Khabib Nurul Huda)